

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi guru merupakan profesi yang paling besar dan luas dibandingkan dengan semua profesi, dan merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam pembentukan semua profesi yang lain. Guru yang baik (qualified) merupakan komponen yang "vital" bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan, kesejahteraan, ketahanan serta keamanan bangsa dan negara masa kini dan yang akan datang.

Untuk menyesuaikan dengan kemajuan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang ada, perlulah kiranya -- bahkan dirasakan harus ada pembaharuan dan peningkatan di bidang pendidikan guru (di Indonesia). Persiapan tenaga guru, merupakan suatu kebutuhan yang kontinyu dari suatu inovasi pendidikan ke inovasi pendidikan berikutnya, maka pendidikan guru harus dipandang sebagai "a future oriented undertaking", yaitu suatu bidang aktivitas yang menyangkut perubahan, memodifikasikan dengan perubahan, dan tumbuh berkembang melalui perubahan. Hal ini mudah dimengerti, karena perubahan adalah ciri khas pendidikan sebagai proses sosial atau proses manusiawi. Dengan demikian, guru harus sensitif dan berperan serta secara aktif dan kreatif terhadap setiap

perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat.

Dr. Moh. Amien, M.A., dalam rangka Temukarya Pendidikan II (1990) di Jakarta, dengan makalahnya yang berjudul: **PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA** mengemukakan bahwa seorang guru harus tanggap terhadap:

1. kondisi dan perkembangan ilmu dan teknologi masa kini dan masa depan serta hakikat dan kondisi ilmu dan teknologi pada umumnya;
2. pandangan sosial-budaya pada masa kini dan arah tradisi perkembangannya untuk masa depan;
3. masalah-masalah sosial yang timbul dari isu-isu sosial;
4. dasar pemikiran yang kontemporer untuk suatu pendidikan yang signifikan dan relevan bagi masa kini dan masa depan.

Terlebih untuk guru kejuruan teknologi, seperti guru-guru STM, kepekaan terhadap perkembangan iptek dan kondisi masyarakat (masyarakat industri) harus selalu diikuti, dan harus sudah merupakan kebutuhan dari guru yang bersangkutan dalam statusnya sebagai seorang pendidik. Hal ini sudah barang tentu menuntut peningkatan kemampuan bagi para guru tersebut -- terlebih bagi mereka yang masih berkualifikasi perlu ditingkatkan.

Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPGT) telah melaksanakan Program Diploma III Guru Kejuruan Teknologi sejak tanggal 12 Januari 1981, sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam hal ini oleh Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan) tanggal 15 September 1980, No. 122/C4/I/80 (Fakpahan, 1984 : 1).

Sebagai program lanjutan dari misi PPPGT Bandung yang telah mendidik atau melaksanakan Program Diploma III Guru Kejuruan Teknologi; mulai tahun akademik 1991/1992 telah mewujudkan kesepakatan bersama dengan FPTK IKIP Bandung, dalam melaksanakan program pendidikan Strata 1 (S1) bagi guru STM lulusan Program D-III/Akta III.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam mewujudkan kerjasama antara kedua lembaga pendidikan tersebut. Seperti tertuang dalam Buku I Program Pendidikan Strata 1 (S1) Pendidikan teknologi dan Kejuruan bagi lulusan D-III Guru Kejuruan Teknologi PPPG Teknologi dan atau yang setara, kerjasama PPPGT Bandung dengan FPTK- IKIP Bandung, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Program Pelita V khususnya sektor pendidikan, dititikberatkan pada peningkatan mutu lulusan.
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa pengadaan guru pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
3. a. PP No. 30 tahun 1990 Bab VI pasal 20 tentang Otonomi Keilmuan Perguruan Tinggi yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
b. PP No. 30 tahun 1990 Bab III pasal 4 tentang Pendidikan Profesional yang mengutamakan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh Institut dan Universitas.
4. Bahwa pendidikan dan latihan kedinasan adalah upaya pemberian bekal atau peningkatan atau pemantapan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru (SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPENGAWAIAN NEGARA NOMOR 57686/MPR/1989, NOMOR 38/SE/1989).

5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta usaha peningkatan kualitas hasil pendidikan saat ini, memerlukan tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan SLTA termasuk STM, minimal berkualitas Si.
6. Hasil evaluasi lapangan yang dilakukan secara bersama oleh dosen IKIP Bandung terutama FPTK dengan PPPG Teknologi Bandung memperoleh beberapa kesimpulan antara lain:
 - a. Program Pembangunan Pendidikan Menengah teknologi telah berhasil menyediakan sarana fisik berupa gedung, peralatan praktek, dan fasilitas penunjang lainnya bagi 125 STM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
 - b. Kurang lebih 4000 guru Diploma Tiga (D-III) hasil kerjasama PPPG Teknologi Bandung dengan IKIP Bandung telah mengajar di STM - STM.
 - c. Guru STM lulusan D-III hasil kerjasama PPPG teknologi Bandung dengan IKIP Bandung telah menghasilkan dampak positif dalam performa mengajar praktek keterampilan dan disiplin kerja.
 - d. Masih terdapat beberapa kelemahan guru STM lulusan kerjasama PPPG Teknologi Bandung dengan IKIP Bandung pada penguasaan konsep teknologi sesuai dengan bidang keahlian dan kependidikan secara utuh yang diperlukan untuk menunjang profesinya (Buku I, 1991 : 1-2).

Peningkatan kemampuan guru merupakan kebutuhan bagi tercapainya tujuan pendidikan, yang pada akhirnya diproyeksikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (mutu lulusan anak didiknya). Walaupun banyak faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan kita, akan tetapi pada umumnya sebagian besar masyarakat menuding penyebab utamanya yakni faktor guru. Gurulah sebagai korban kambing-hitam penyebab rendahnya mutu pendidikan kita, dengan tuduhan ... guru tidak kompeten, guru tidak profesional.

Berdasarkan asumsi bahwa gurulah faktor utama yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, maka salah satu

cara untuk mengatasinya ialah guru harus ditingkatkan lebih dulu kemampuannya -- harus kompeten dan harus profesional dalam mengemban tugasnya. Kemampuan-kemampuan apa yang harus dikuasai dan/atau dikembangkan oleh seorang guru? Weigand (1971 : xi) mengemukakan seperti berikut ini.

Developing these teacher competencies--knowing intellectual developmental stages, formulating performance objectives, developing question-asking skills, sequencing instruction, evaluating progress, and developing creativity - is essential if effective instruction is to materialize. But these six competencies are not sufficient by themselves. The teacher must also learn positive behavioral skill so that he or she may engage in human interaction with students and to a large degree personalize education. High interpersonal trust must permeate the classroom. Positive human interaction is necessary if high interpersonal trust is to develop.

Begitu kompleks tuntutan bagi seorang guru harus menguasai sejumlah kemampuan (Competencies), yang mana hal ini harus dipikirkan oleh para pendidik calon-calon guru, bagaimana mengupayakan peningkatan atau pengembangan kompetensi guru tersebut -- termasuk bagi mereka yang telah menjadi guru. Dalam hal ini, Maerah (1991 : 4) mengemukakan bahwa:

... teacher educators hardly specified the necessary competencies that teacher need to function effectively. However, the term competency is not new, in the literature, "Competencies" has been defined to encompass the attitude understanding, skill and behaviours that facilitate intellectual, social, emotional and physical growth in children. All of these deals with the functional of teaching and with the ability to perform teaching roles.

Program kerjasama antara PPPG Teknologi Bandung dengan FPTK IKIP Bandung dalam mendidik guru-guru STM dari lulusan D-III/Akta III tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas guru, baik kualitas pengetahuan, sikap maupun keterampilannya -- yang sekaligus memenuhi tuntutan kualifikasi guru STM untuk bidang studi kejuruannya sesuai dengan tuntutan di lapangan. Seperti apa yang diungkapkan Prof. Dr. Conny R. Semiawan, dalam rangka pertemuan Konsorsium Ilmu Pendidikan (1986) di Bandung, dengan makalahnya yang berjudul: PERSPEKTIF BARU DALAM PENDIDIKAN GURU mengemukakan bahwa beberapa permasalahan dalam meneropong situasi saat ini dapat dibagi menjadi masalah internal, khususnya masalah pendidikan guru, dan masalah eksternal, yaitu berbagai faktor yang merupakan dampak dari perkembangan masyarakat dan pembangunan bangsa dan negara. Masalah internal merupakan masalah efisiensi pendidikan guru, yaitu ukuran seberapa efektif dilaksanakannya proses belajar-mengajar, sedangkan masalah eksternal berkenaan dengan efisiensi eksternal dan mencakup seberapa relevansi pendidikan tenaga kependidikan (di LPTK) dengan tuntutan lapangan kerja.

Dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan aspek-aspek pengendalian mutu dalam penyelenggaraan program pendidikan strata satu (S1) "in-service" tersebut ditunjang oleh segala sumber-daya

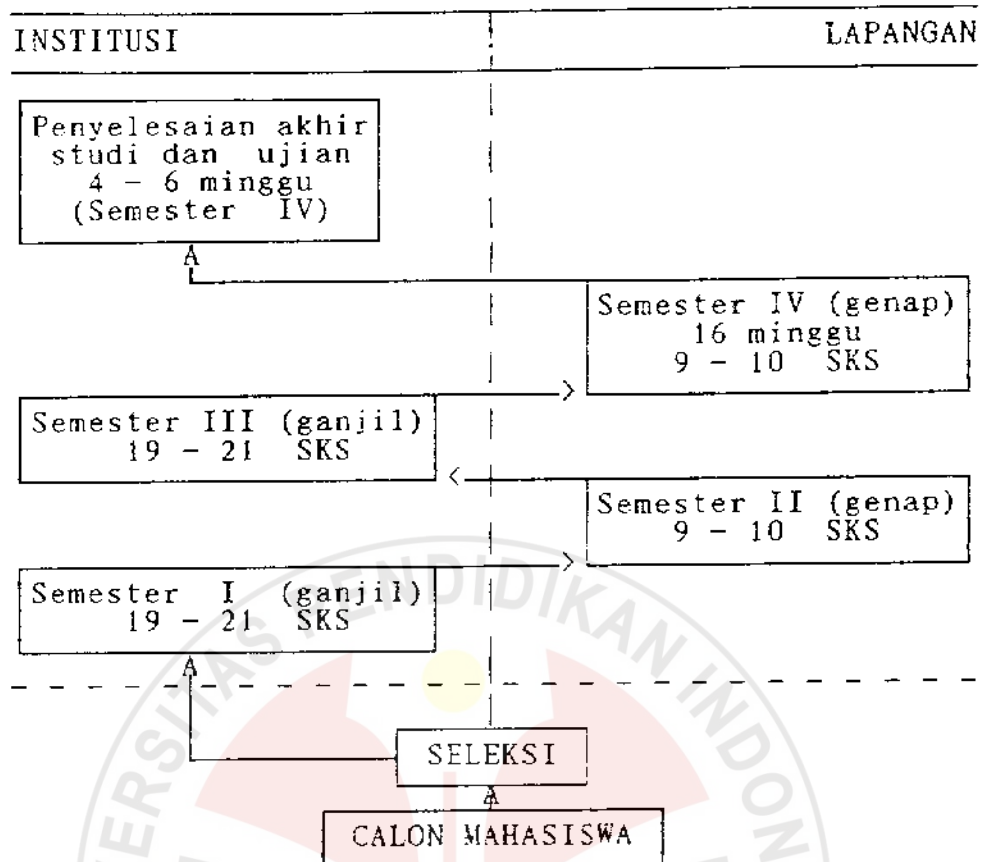
yang dimiliki oleh PPPG Teknologi Bandung dan FPTK - IKIP Bandung. Program pendidikan ini dirancang dan dilaksanakan dengan pola "sandwich system", yaitu dilaksanakan antara di institusi dan di lapangan. Pola ini diharapkan akan merupakan suatu langkah inovatif dalam rangka mendekatkan kompetensi lulusan dengan tuntutan kebutuhan lapangan tugasnya di STM, dan sekaligus memberikan dampak positif terhadap pengembangan sekolah.

Berdasarkan hasil analisis kesetaraan antara Kurikulum Program D-III Guru Kejuruan Teknologi PPPG Teknologi Bandung dan Kurikulum Program Pendidikan Strata 1 (S1) FPTK - IKIP Bandung ... beban belajar yang harus ditempuh untuk setiap program studi bervariasi antara 56 - 60 SKS. Beban belajar tersebut dirancang dan didistribusikan untuk dapat ditempuh selama empat semester (Buku I, 1991 : 4).

Perancangan dan pendistribusian jumlah SKS yang harus ditempuh selama empat semester tersebut di atas pertimbangan dan pelaksanaan program, sebagai berikut:

1. Satu semester, adalah satuan waktu penyelenggaraan kuliah yang terdiri dari 22 minggu. Artinya setiap semester terdiri dari 22 kali pertemuan perkuliahan termasuk ujian-ujian.
2. Setiap minggu terdiri dari 40 jam periode belajar.
3. Jam periode belajar tersebut diatur sebagai berikut
 - 3.1. Setiap tatap muka (teori) adalah 50 menit.
 - 3.2. Untuk praktek/praktikum dan kuliah lapangan masing-masing 60 menit.
4. Khusus pada semester terakhir (semester IV), penyelenggaraan di lapangan hanya dilaksanakan selama 16 minggu, sisanya antara 4 s.d. 6 minggu dilaksanakan di institusi untuk kegiatan ujian dan penyelesaian akhir studi (Buku I, 1991 : 4).

Adapun pola "sandwich system" penyelenggaraan dan sebaran beban belajarnya ditetapkan sebagai berikut



Gambar 1: Pola "Sandwich System" Pendidikan Program S1 (in-service) PPPGT - FPTK IKIP Bandung.

Yang menarik perhatian bagi penulis (khususnya), yakni mengenai implementasi PPL Kependidikan dalam program pendidikan tersebut menerapkan pola "sandwich system". Di mana, berdasarkan struktur program Kurikulum S1 kerjasama PPPGT dengan FPTK - IKIP Bandung, ternyata untuk mata kuliah PPL (Kode 589/4 SKS) dilaksanakan dalam 3 (tiga) semester (dimulai pada semester kedua dari empat semester), dengan distribusi pembobotan SKS sebagai berikut:

- Untuk semester II dengan bobot 2 SKS (di lapangan).
- Untuk semester III dengan bobot 1 SKS (di institusi).
- Untuk semester IV dengan bobot 1 SKS (di lapangan).

Walaupun telah cukup banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan PPL, akan tetapi untuk konteks PPL pola "sandwich system" ini belum penulis temukan. Hasil-hasil penelitian, seperti: Waini Rasyidin (Disertasi 1988) mengenai "Kemampuan Mengajar Dilihat dari Kemampuan Bidang Studi dan Penguasaan PBM" studi deskriptif-analitik pada mahasiswa di FPMIPA - IKIP Bandung; Muliati Purwasasmita dan Uu Suarsih (1989) mengenai "Masalah-Masalah yang Dihadapi Mahasiswa IKIP Bandung dalam Mengikuti Pelaksanaan PPL", Bohar Suharto, dkk. (1990) mengenai "Kaitan Pelaksanaan PPL dengan Penampilan Guru Lulusan IKIP"; Daman Hermawan (Tesis, 1991) mengenai "Supervisi PPL oleh Kepala Sekolah, Guru Pamong, dan Dosen Pembimbing dalam Upaya Pembentukan Kemampuan Mengajar Mahasiswa".

Dari hasil-hasil penelitian tersebut ... ternyata kesemuanya berkaitan dengan penyelenggaraan PPL dalam pola "linier", di mana untuk mahasiswa program S1 LPTK/IKIP dilaksanakan pada semester VII dari 8 (delapan) semester, yang pelaksanaannya ditempuh selama 2 bulan secara blok waktu, dengan bobot/beban belajar 4 SKS.

Atas pertimbangan tersebut, maka penulis (sebagai salah seorang staf UPT PPL IKIP Bandung) memandang perlu untuk melakukan suatu studi/penelitian mengenai penyelenggaraan PPL dengan pola "sandwich system" tersebut.

B. Masalah Penelitian

Dari gambaran latar belakang penelitian yang telah penulis paparkan, sebagai masalah pokok dalam penelitian ini berkisar pada permasalahan PPL Kependidikan, yakni mengenai: Penyelenggaraan PPL Kependidikan mahasiswa program S1 (in-service) kerjasama PPPG Teknologi Bandung dengan FPTK IKIP Bandung yang dilaksanakan dalam pola "sandwich system".

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimanakah Penyelenggaraan PPL Kependidikan dengan Pola Sandwich System bagi Mahasiswa Program S1 (in-service) PPPGT - FPTK IKIP Bandung dilihat dari latar belakang, pelaksanaan, maupun dampak yang dihasilkannya ?*

Penyelenggaraan PPL pola "Sandwich System" dalam penelitian ini yakni menyangkut kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan mata kuliah PPL program pendidikan S1 (in-service) PPPGT - FPTK IKIP Bandung. Kegiatan yang dimaksud antara lain: (1) proses belajar mengajar dalam

mata kuliah PPL tersebut, (2) sistem pembimbingan terhadap praktikan selama PPL.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini proses belajar yang dimaksud adalah *proses belajar mengajar mata kuliah PPL baik pada saat di lapangan maupun pada saat di institusi*. Telaah terhadap proses belajar mengajar tersebut meliputi: (a) program pembelajaran dari dosen penanggung jawab mata kuliah PPL, (b) pelaksanaan program, yang meliputi: (1) tujuan, (2) materi, (3) prosedur, (4) media, dan (5) sistem evaluasi. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tersebut ditelaah pula mengenai latar belakang pembimbing; demikian pula para mahasiswanya.

Mengenai sistem pembimbingan terhadap para praktikan selama melaksanakan PPL; telaahan difokuskan pada saat proses PPL di institusi dan PPL di lapangan yang kedua.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penyelenggaraan PPL Kependidikan yang berada di bawah naungan LPTK IKIP Bandung terdapat dua model penerapan konsep/pola. Yang pertama, ialah pola "linier bertahap", yakni pada pelaksanaan PPL Kependidikan bagi mahasiswa reguler IKIP Bandung pada umumnya, di mana untuk mahasiswa program S1 dilaksanakan pada awal semester VII dengan lama pelaksanaan di lapangan 2 (dua) bulan. Yang kedua, ialah pola "sandwich system", yakni pada pelaksanaan PPL Kependidikan bagi mahasiswa program S1 (in-service) kerjasama PPPGT - FPTK IKIP Bandung, di mana

pelaksanaannya secara berlapis-berulang selama tiga semester.

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi pada pelaksanaan PPL Kependidikan dengan pola "sandwich system" yakni pada penyelenggaraan PPL Kependidikan bagi mahasiswa program S1 (in-service) kerjasama PPPGT-FPTK IKIP Bandung.

Seperti telah penulis ungkapkan, bahwa PPL Kependidikan pola "sandwich system" ini dilaksanakan selama tiga semester dari empat semester yang harus ditempuh dalam pelaksanaan program pendidikan "in-service" kerjasama ini. Untuk pelaksanaan PPL tahap pertamanya, yakni dimulai pada semester II (di lapangan) dengan bobot 2 SKS (untuk mahasiswa angkatan pertama berakhir pada bulan Juli 1992). Jadi, untuk berikutnya yakni PPL di institusi dengan bobot 1 SKS, dan PPL di lapangan berikutnya dengan bobot 1 SKS. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan PPL di institusi dan PPL di lapangan berikutnya. Sebagai alasannya antara lain:

- 1) PPL Kependidikan di institusi, merupakan lanjutan dari PPL Kependidikan di lapangan, yang merupakan ciri khas dari PPL pola "sandwich system" tersebut. Sebagai implementasi lanjutan dari PPL di lapangan, PPL di institusi ini merupakan sarana revisi dari apa yang telah dialami selama di lapangan. Selain daripada itu,

PPL di institusi ini merupakan pengayaan materi kependidikan dalam rangka bekal untuk pelaksanaan PPL di lapangan berikutnya.

- 2) PPL Kependidikan berikutnya (setelah PPL di institusi) merupakan tahap tindak lanjut dalam rangkaian pola "sandwich system" tersebut. Dengan demikian dapat dilihat keterkaitan antara masing-masing tahap pelaksanaannya.

3. Pertanyaan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan pokok masalah penelitian, sebagai pertanyaan penelitian dalam kaitan dengan topik-topik masalah PPL Kependidikan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa dalam penyelenggaraan PPL Kependidikan bagi mahasiswa program S1 (in-service) PPPGT – FPTK IKIP Bandung menggunakan konsep/pola "sandwich system" ? Dari pertanyaan tersebut, penulis rinci menjadi: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan penerapan pola "sandwich system" tersebut dalam penyelenggaraan PPL Kependidikan ? (2) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penerapan pola "sandwich system" dalam PPL Kependidikan tersebut ?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan PPL Kependidikan dalam pola "sandwich system" ?

Dalam hal ini, dirinci pertanyaan antara lain: (1) Siapakah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PPL Kependidikan di lapangan/institusi?, (2) Bagaimana koordinasi pihak pelaksana untuk PPL di lapangan dan PPL di institusi?, (3) Apa yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan PPL Kependidikan di lapangan? Apa pula yang menjadi sasaran dari pelaksanaan PPL di institusi?, (4) Materi-materi apa saja yang dijadikan bekal para mahasiswa untuk pelaksanaan PPL Kependidikan di lapangan? Apa dasar pertimbangannya (mengapa materi tersebut yang diberikan)?, (5) Bagaimana keterkaitan antara materi PPL di institusi dengan pelaksanaan PPL di lapangan? Mengapa demikian?, (6) Bagaimana sistem evaluasi PPL Kependidikan pola "sandwich system" tersebut (di lapangan maupun di institusi)?.

3. Faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan PPL pola "sandwich system"? Untuk pertanyaan ini penulis rinci antara lain: (1) Bagaimana kondisi dosen penanggung jawab mata kuliah PPL tersebut?, (2) Bagaimana kondisi guru pamong yang terlibat?, (3) Bagaimana kondisi praktikan?, (4) Bagaimana kondisi lapangan?.

4. Kesulitan apakah yang dihadapi dan bagaimana upaya penanggulangannya dalam pelaksanaan PPL tersebut? Untuk pertanyaan ini meliputi antara lain: (1) Apakah kesulitan yang dihadapi oleh pihak institusi (dalam hal ini dosen penanggung jawab mata kuliah tersebut), dan

bagaimana upaya penanggulangannya ?, (2) Apakah kesulitan yang dihadapi oleh pihak lapangan, dan bagaimana upaya penanggulangannya ?, (3) Apakah kesulitan yang dihadapi oleh pihak mahasiswa (praktikan), dan bagaimana upaya penanggulangannya ?.

5. Bagaimanakah dampak/hasil yang dicapai dari penyelenggaraan PPL Kependidikan dengan menggunakan pola "sandwich system" tersebut ?

Untuk pertanyaan ini, penulis rinci menjadi pertanyaan-pertanyaan: (1) Bagaimana dampaknya terhadap pihak institusi ?, (2) Bagaimana dampaknya terhadap pihak lapangan/sekolah ?, (3) Bagaimana dampaknya terhadap pihak mahasiswa (dalam aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor) ?

C. Definisi Operasional

Berikut ini penjelasan mengenai istilah dan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. PPL Kependidikan

Program Pengalaman Lapangan (PPL) Kependidikan merupakan salah satu mata kuliah dalam Kurikulum LPTK (khususnya IKIP Bandung) dalam kelompok MKPBM.

PPL merupakan salah satu kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa, yang mencakup baik latihan mengajar maupun tugas-tugas kependidikan di luar mengajar secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi

persyaratan pembentukan profesi kependidikan (Depdikbud, Dirjen Dikti, 1981 : 5).

2. Sandwich System

Sandwich system merupakan salah satu bentuk pendekatan dari pelaksanaan konsep Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi (PGBK), di mana setelah teori tertentu, diberikan kesempatan untuk praktek, untuk kemudian dikaji kembali secara teoritis, dan seterusnya (Konsorsium Ilmu Pendidikan, 1980 : 22).

Program pendidikan S1 (in-service) PPPGT - FPTK IKIP Bandung dirancang dan dilaksanakan dengan pola "sandwich system", yaitu dilaksanakan di institusi dan di lapangan (Depdikbud, P3GT - FPTK IKIP Bandung, 1991:4). Berkaitan dengan PPL Kependidikan pola "sandwich system" dimaksudkan bahwa PPL tersebut dilaksanakan di lapangan dan di institusi. Dalam pelaksanaannya dimulai dengan pembekalan secara teoritis (proses pra-PPL ke lapangan), kemudian proses PPL di lapangan (tahap pertama), dilanjutkan dengan PPL di institusi (tahap kedua), dan diakhiri dengan PPL di lapangan (tahap ketiga).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan wawasan akademis, penelitian ini bertujuan guna menambah cakrawala-pandang (khususnya bagi penulis) dalam bidang keilmuan, yang berkaitan dengan

pokok permasalahan penelitian. Di samping itu, tujuan penelitian ini guna memperkaya hasil penelitian dalam khasanah bidang pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan PPL Kependidikan dengan pola "sandwich system".

Secara operasional, tujuan penelitian ini diarahkan pada pencapaian sasaran dalam menjawab pokok permasalahan, yakni guna memperoleh gambaran konkret mengenai penyelenggaraan PPL Kependidikan pola "sandwich system", khususnya dalam rangka program pendidikan mahasiswa S1 (in-service) PPPGT - FPTK IKIP Bandung -- dengan segala aspek permasalahannya. Secara lebih khusus, tujuan penelitian ini adalah guna memperoleh gambaran yang mendalam tentang:

- 1) alasan, baik konseptual maupun praktis, digunakannya pola "sandwich system" dalam pelaksanaan PPL Kependidikan mahasiswa strata satu (S1) PPPGT - FPTK IKIP Bandung,
- 2) proses pelaksanaan PPL pola "sandwich system", baik proses di institusi maupun proses di lapangan,
- 3) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PPL pola "sandwich system",
- 4) kesulitan-kesulitan dan upaya penanggulangannya dalam pelaksanaan pada PPL pola "sandwich system",
- 5) dampak dari penyelenggaraan PPL pola "sandwich system" yang meliputi: dampak terhadap pihak institusi, pihak lapangan, dan pihak mahasiswa itu sendiri.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, manfaat penelitian ini berkaitan dengan perbaikan aplikasi konsep "sandwich system" dalam penerapannya pada mata kuliah PPL Kependidikan bagi mahasiswa program S1 (in-service). Jadi, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan PPL Kependidikan berikutnya.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PPL pola "sandwich system", antara lain:

1. Dosen penanggung jawab mata kuliah PPL dalam pelaksanaan proses belajar mengajar secara keseluruhan (baik di lapangan maupun di institusi) dengan memperhatikan ketentuan/pedoman yang berlaku.
2. UPT PPL IKIP Bandung, dalam rangka menyempurnakan pedoman pelaksanaan PPL yang ada secara komprehensif.
3. Sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan PPL pola "sandwich system" dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif bagi praktikan selama melaksanakan tugas PPL di lapangan.
4. Pihak penanggung jawab program pendidikan S1 (in-service) PPPGT - FPTK IKIP Bandung dalam rangka melaksanakan konsep yang diterapkan secara konsisten.